UNIVERSITAS DARMA PERSADA
PERPUSTAKAAN

PERKEMBANGAN SHŌEN

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai salah satu persyaratan
mencapai gelar Sarjana Sastra

oleh
FRENSINAWATI
NIM. 02110058

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARMA PERSADA
No Induk : 070 | FS | 06-07
No Klas : 952 FRE-P
Subjek : SEJARAH JEPANG
Asal : MHS
Dan lain-lain :

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2006

Halaman Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang berjudul :

PERKEMBANGAN SHŌEN

Oleh

ERENSINAWATI

NIM: 02110058

Disetujui untuk disajikan dalam sidang Skripsi Sarjana, oleh:

Pembimbing I

(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Jepang

(Syamsul Bahri, S.S)

Pembimbing II

(Syamsul Bahri, S.S)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai salah satu persyaratan

mencapai gelar Sarjana Sastra

Telah disahkan pada

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Agustus 2006

Ketua Jurusan Jepang

(Syamsul Bahri, S.S)

Dekan Fakultas Sastra

(Dr. Hj. Albertine S. Minderop, M.A)

Skripsi ini telah diujikan pada hari Rabu, 09 Agustus 2006.

PANITIA UJIAN

Ketua	Pembimbing
(Dra. Tini Priantini)	(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)
Panitera	Pembaca
(Oke Diah Arini, S.S)	(Syamsul Bahri, S.S)

Halaman Pernyataan

Skipsi yang berjudul:

PERKEMBANGAN SHŌEN

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd dan Bapak Syamsul Bahri, S.S, dan tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2006.

Frensinawati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat kasih sayang-Nya yang tiada henti diberikan-nya, serta puja puji yang dilimpahkan selalu terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Sastra Jepang Universitas Darma Persada.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, dan mendorong penulis dengan penuh kesabaran serta pengertian sampai penulisan skripsi ini selesai.
2. Bapak Syamsul Bahri, S.S, selaku Ketua Jurusan Fakultas Sastra Jepang dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Ketua Sidang.
4. Ibu Oke Diah Arini, S.S, selaku Panitera Sidang.
5. Ibu Dr. Hj. Albertine S Minderop, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.

6. Keluarga tercinta, terutama ayah bundaku yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan perlindungan dengan segala kasih sayangnya beserta kakak-kakakku, Mas Ari, Mas Bowo, Mbak Tuti, dan Mbak Rena yang selalu mendukung secara moril. Tidak lupa rasa kasih sayang terhadap keponakanku, Hani.
7. Teman-teman terbaikku Putri, Cici, Ina, Santi, Tri, Bayi, Nadia, Ulil, Intan beserta teman-teman di Fakultas Sastra yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian yang terbaik.

Jakarta, 09 Agustus 2006

Frensinawati

ABSTRAK

Frensinawati. **PERKEMBANGAN SHŌEN**. Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Jakarta, Agustus 2006.

Shōen adalah suatu istilah untuk tanah milik pribadi. Istilah tersebut mulai digunakan sejak jaman Nara. Pemerintah pada masa itu memberi kebijakan dengan memberikan hak kepada para bangsawan untuk membuka lahan pertanian baru yang boleh dimiliki selama-lamanya dengan mempekerjakan para petani miskin, ketika para petani itu tidak mempunyai pekerjaan akibat tanah mereka tidak produktif lagi, tanah-tanah yang baru dibuka itulah yang kemudian menjadi tanah milik pribadi yang dinamakan *shōen*. Sampai pada era Kamakura, *shōen* yang berdampingan dengan organisasi feodal masih terdapat keseimbangan, akan tetapi pada awal era Muromachi perang saudara antara istana-istana utara dan selatan menggoyahkan keseimbangan tersebut. Singkatnya *shōen* runtuh pada era Muromachi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Ruang Lingkup 6

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II SRUKTUR PEMILIKAN TANAH

A. Hak Milik Tanah pada Jaman Yamato 8

B. Pembaharuan Taika 11

1. Penyitaan Tanah dari Kepala Klan 11

2. Penghapusan Wewenang Klan 12

3. Pembagian Kembali Tanah 14

4. Pertumbuhan Pemilikan Tanah Secara Besar-besaran 16

C. Hak Milik Tanah pada Jaman Nara 17

D. Hak Milik Tanah pada Jaman Heian 19

BAB III PERKEMBANGAN SHŌEN

A. Munculnya Istilah *Shōen* 21

B. Terbentuknya Lembaga *Shōen* 21

1. Feodalisme *Shōen* 23

2. Kepala Keluarga Militer 25

3. Perubahan-perubahan Dalam Lembaga *Shōen* 33

C. Pertumbuhan *Shōen* 36

D. Merosotnya Feodalisme 40

1. Sifat "*Buke no Toryō*" yang Berubah-ubah 40

2. Merosotnya Feodalisme Gaya *Shōen* 42

3. Pertumbuhan Propinsi-propinsi yang Dikuasai *Shugo* 43

E. Dampak Diberlakukannya *Shōen* 45

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

GLŌSARI

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembabakan sejarah mempunyai makna penting dalam memahami proses perkembangan suatu bangsa. Dalam sejarah Jepang, periodisasi tersebut dapat terlihat dengan jelas dari sistem politiknya yang memiliki kesinambungan.

Sistem-sistem politik yang berlaku di Jepang berakar dari sistem politik tradisional yang berpusat pada sistem klan, yakni sistem yang telah berlaku sebelum terbentuknya negara Jepang purba pada jaman kekaisaran Yamato yang konon didirikan oleh Kaisar Jinmu di dataran Nara. Kaisar Jinmu adalah Kaisar pertama di Jepang.

Terbentuknya negara Jepang purba ini (Yamato) adalah sebagai akibat lahirnya sistem politik yang berpusat pada klan-klan penakluk yang mengasosiasikan dirinya dengan Dewa, yakni apa yang dikenal dengan sistem Tennō (kaisar) yang artinya dengan mengakui sebagai keturunan Dewa, mereka adalah sumber dari semua kekuasaan, sehinggga seluruh sistem hukum dan pemerintahan, termasuk sistem pembagian tanah dirancang untuk memperkuat kekuasaan Tennō (kaisar).

Kekaisaran Yamato yang diperintah oleh seorang kaisar ini, dibantu oleh para kepala klan yang merupakan pembantu kaisar. Sistem seperti ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-7. Karena itulah, struktur politik saat itu

mencerminkan struktur kelas masyarakat pada masa itu, yaitu keturunan Tennō merupakan kelas tertinggi, sedangkan para kepala klan berada di bawahnya. Klan pun mempunyai tugas-tugas khusus dalam sistem pemerintahan purba ini, misalnya klan Nakatomi, klan ini mengurusi masalah upacara "keagamaan" di istana; klan Mononobe dan klan Otomo bertugas mengurusi masalah pertahanan dan kemiliteran; dan klan Soga mengurusi bidang keuangan dan ekonomi negara.

Mengenai sistem pembagian tanah, pada jaman tersebut tanah dimiliki oleh Tennō dan para klan secara otomatis. Para penghuni tanah juga menjadi milik Tennō dan para klan. Kewajiban mereka (para penghuni tanah) di samping mengolah tanah, juga membuat bermacam-macam perlengkapan yang dibutuhkan oleh pihak istana.[1]

Seiring dalam proses sejarah selanjutnya kepala-kepala klan yang pada mulanya merupakan pembantu-pembantu kaisar dalam melaksanakan sistem penguasaan, kemudian muncul sebagai golongan bangsawan yang mengendalikan kekuasaan politik sehingga posisi kaisar melemah. Namun memasuki tahun 593, yaitu pada masa pemerintahan kaisar Putri Suiko, terjadi perubahan penting dalam sejarah politik Jepang. Pada waktu itu Shotoku Taishi (Pangeran Shotoku) cucu dari Kaisar Kinmei diangkat sebagai wali kaisar yang disebut *sesshō* bagi Tennō Suiko. Di bawah pimpinannya bangsa Jepang mulai mengadakan pemusatan kekuasaan pemerintahan Yamato dan terjadi perubahan susunan masyarakat.

---

[1] Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A., *Pengantar sejarah Jepang I* (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996), hlm. 6

Menurut Shotoku dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk dan daerah yang ditaklukan, maka sistem pemerintahan yang berdasarkan klan tidak dapat dipertahankan lagi.[2] Sistem pemerintahan berdasarkan klan ini diganti oleh sistem tingkatan-tingkatan menurut kepandaian seseorang yang dikenal dengan sistem *Kan'i Juni Kai no Seidō*. Dengan demikian, sejak sistem ini ditetapkan pada tahun 603 pejabat-pejabat pemerintahan yang dipilih berdasarkan klan kemudian diganti berdasarkan kemampuan atau kepandaian.

Selanjutnya untuk mengembalikan wibawa dan kekuasaan politik kaisar, Shotoku memerintahkan kepada pegawai istana untuk menulis Sejarah Kaisar Negara, adapun yang ditulis dalam buku tersebut adalah silsilah kaisar-kaisar Jepang yang intinya menjelaskan bahwa kekuasaan politik berada secara turun temurun untuk menghormati kaisarnya.

Kebijakan Shotoku ini berpengaruh besar untuk menggerogoti pengaruh politik para kepala klan. Pada masa pemerintahannya, Shotoku pun mengirimkan para biksu dan mahasiswa untuk mempelajari agama Budha di Cina. Para biksu dan mahasiswa itulah yang kemudian menjadi pelopor "Pembaharuan" di Jepang setelah mereka kembali dari Cina.

Shotoku tidak berhasil menjalankan semua ide pembaharuan politiknya selama masa pemerintahannya. Baru dua puluh tahun kemudian yakni pada tahun 646 pembaharuan politiknya dilaksanakan dengan lebih nyata oleh para pengikutnya, yaitu Nakano Oe dan Fujiwara. Pembaharuan ini dikenal dengan

[2] Yeti Nurhayati, *Langkah-langkah Awal Modernisasi Jepang* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1987), hlm. 3

nama *Pembaharuan Taika.* Isi terpenting dari *Pembaharuan Taika* adalah disitanya tanah-tanah yang dimiliki oleh para kepala klan dan dianggap menjadi milik negara. Tindakan ini dikenal dengan nama *Kōchi kōmin* (tanah beserta rakyat milik negara). Tanah tersebut kemudian dibagikan kembali kepada rakyat.

Pembaharuan Taika selanjutnya dilaksanakan oleh Kaisar Tenmu setelah ia meresmikan kitab undang-undang yang dikenal dengan nama *Ritsuryō. Ritsuryō* merupakan inti dari *Pembaharuan Taika* secara tertulis. *Ritsuryō* kemudian diubah pada masa pemerintahan Kaisar Monmu, cucu Kaisar Tenmu, dengan nama *Taihō Ritsuryō. Taihō Ritsuryō* adalah kumpulan kitab undang-undang yang terdiri dari 6 buah kitab undang-undang pidana atau *Ritsu* dan 11 buah kitab undang-undang administratif atau *Ryo. Taihō* adalah nama tahun pada waktu kitab undang-undang ini ditetapkan. Pemerintahan selanjutnya diatur berdasarkan *Taihō Ritsuryō* ini.

Setelah pemerintahan di bawah sistem *Taihō Ritsuryō* berjalan dengan sempurna dan untuk mencari semangat baru, maka Kaisar Kenmei memindahkan ibu kota dari Asuka ke Nara pada tahun 710. Padajaman ini dikenal dengan nama jaman Nara.

Pada jaman Nara terjadi ketidakpastian dalam bidang pemikiran tentang *Ritsuryō.* Agaknya, sistem *Ritsuryō* ini berdasarkan pemikiran Konfusianisme yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran agama Budha dan perhatian Kaisar yang berlebihan terhadap agama Budha yang lebih memusatkan perhatiannya terhadap pembangunan secara besar-besaran kuil-kuil Budha, telah

menguras keuangan negara dan tenaga kerja bakti seluruh rakyat. Akibatnya, petani yang bertempat tinggal di desa-desa hidup menderita, sedangkan sekelompok orang lainnya, yaitu bangsawan yang tinggal di kota, hidup berkecukupan sebagai akibat penarikan pajak-pajak yang mereka lakukan.[3]

Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penduduk. Mereka berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan semakin sempitnya tanah-tanah pertanian. Banyak petani yang meninggalkan tanahnya yang sudah tidak produktif, bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya menjadi gelandangan di ibukota.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat melaksanakan beberapa kebijaksanaan, di antaranya adalah dengan memberikan hak kepada para bangsawan untuk membuka lahan pertanian baru yang boleh dimiliki selama-lamanya, dan mempekerjakan para gelandangan di tanah-tanah yang baru dibuka tersebut. Tanah pertanian baru tersebut kumudian menjadi tanah milik pribadi yang dinamakan *Shōen*.[4]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang *Shōen* yang menjadi ciri khas tanah di Jepang.

---

[3] Surajaya. *op cit.* hlm. 13
[4] *Ibid*

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana awal diberlakukannya sistem kepemilikan *Shōen*?
2. Bagaimana perkembangan *Shōen* sebagai ciri khas tanah di Jepang?
3. Bagaimana dampak diberlakukannya sistem kepemilikan *Shōen*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Sejarah dan perkembangan diberlakukannya sistem *Shōen*.
2. Dampak diberlakukannya sistem kepemilikan *Shōen*.

D. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penelitian ini adalah dari latar belakang lahirnya sistem kepemilikan *Shōen* sampai pada dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya sistem kepemilikan *Shōen*.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu berupa pemaparan berdasarkan sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi penjelasan mengenai struktur pemilikan tanah.

Bab III Berisi penjelasan mengenai perkembangan *shōen*.

Bab IV Kesimpulan

UNIVERSITAS DARMA PERSADA